

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), Antara Tantangan dan Tuntutan

Megawati Barthos¹, Lingga Nugraha², Suhadi Sukendar Situmorang³, Ojak Situmeang⁴

^{1,2,3,4}Universitas Borobudur

Email : megawati_barthos@gmail.com¹, lingganugraha1319@gmail.com²,

suhadisitumorang9@gmail.com³, ojiezwor@gmail.com⁴

History:

Received : 15 Januari 2025

Revised : 18 Januari 2025

Accepted : 23 Januari 2025

Published: 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, dengan fokus pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menjadi landasan bagi kebijakan CSR di negara ini. Penelitian ini juga menggali tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan CSR, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur CSR, tantangan utama terletak pada ketidakjelasan kebijakan dan ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Faktor pendukung seperti budaya organisasi dan permintaan pelanggan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan CSR. Sebaliknya, faktor penghambat seperti minimnya sinkronisasi antara pemerintah dan dunia usaha serta kurangnya pedoman teknis yang jelas menjadi hambatan signifikan dalam implementasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan pelaksanaan CSR yang berdampak positif bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility (CSR), Kebijakan CSR, Tantangan CSR, Faktor Pendukung CSR, Faktor Penghambat CSR*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia, focusing on the economic, social, and environmental dimensions that form the basis for CSR policies in this country. This study also explores the challenges faced in implementing CSR policies, as well as the factors that support and inhibit the implementation of CSR by companies. In this study, it was found that although there are regulations governing CSR, the main challenge lies in the lack of clarity of policies and the mismatch between the expectations of the community, companies, and the government. Supporting factors such as organizational culture and customer demand greatly influence the success of CSR implementation. Conversely, inhibiting factors such as minimal synchronization between the government and the business world and the lack of clear technical guidelines are significant obstacles to effective implementation. Therefore, more integrated policies and collaboration between the government, companies, and the community are needed to improve the implementation of CSR that has a positive impact on social and environmental sustainability.

Keywords : *Corporate Social Responsibility (CSR), CSR Policy, CSR Challenges, CSR Supporting Factors, CSR Inhibiting Factors.*

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan berkelanjutan, dengan mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Fauzi & Manao, 2023). CSR mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, seperti program pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan karyawan (Hendar, 2013). Konsep ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan tetapi juga menegaskan peran perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.

CSR memiliki relevansi strategis sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan perusahaan. Dengan menjalankan CSR perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab moral dan hukum tetapi juga menciptakan nilai tambah yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis (Sudirman & Disemadi, 2021). Pendekatan ini membantu perusahaan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, menjaga keberlanjutan operasional, serta mengurangi risiko bisnis. Oleh karena itu, CSR seharusnya dipandang sebagai strategi manajemen, bukan sekadar pengeluaran atau beban biaya. Penerapan CSR yang efektif memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, seperti peningkatan reputasi, loyalitas pelanggan, dan produktivitas karyawan (Pratiwi et al., 2020). CSR juga dapat memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, serta mendukung pelestarian sumber daya

alam. CSR berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), sehingga memperkuat posisi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Santoso & Raharjo, 2022).

CSR menjadi isu strategis di Indonesia karena keberagaman sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tinggi, yang memerlukan perhatian khusus dari perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Sebagai negara dengan populasi besar dan tingkat kesenjangan sosial yang signifikan, keberadaan CSR dapat membantu mengatasi berbagai tantangan sosial, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas bisnis, sehingga CSR menjadi instrumen penting untuk mendukung pelestarian lingkungan dan menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan (Afnahanifa et al., 2021).

Di Indonesia Corporate Social Responsibility telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Budiman, 2019). Namun implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya harmonisasi peraturan, minimnya pengawasan, serta interpretasi yang beragam di tingkat perusahaan. Akibatnya banyak perusahaan

menjalankan CSR secara formalitas tanpa dampak signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan sinkronisasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi CSR di Indonesia adalah kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan dunia usaha. Peraturan terkait CSR, seperti Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, masih memiliki interpretasi yang beragam, sehingga menciptakan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Ketidakharmonisan ini menyebabkan banyak perusahaan bingung dalam menentukan arah dan tujuan CSR mereka. Akibatnya, program CSR sering kali hanya bersifat sporadis dan tidak terintegrasi secara efektif dengan kebutuhan masyarakat serta agenda pembangunan nasional. (Ambadar, 2013)

Selain hambatan kebijakan faktor teknis dan organisasi juga menjadi tantangan besar dalam implementasi CSR. Banyak perusahaan menghadapi kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami konsep CSR secara mendalam (Subyantoro & Suwanto, 2020). Di sisi lain, kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan kebijakan perusahaan sering kali memicu konflik atau ketidakpuasan terhadap program CSR yang dijalankan. Lebih jauh, minimnya budaya organisasi yang mendukung pelaksanaan CSR, seperti kurangnya komitmen manajemen atau fokus perusahaan pada keuntungan jangka pendek, memperburuk efektivitas program CSR.

Masih banyak perusahaan di Indonesia yang memandang CSR hanya

sebagai kewajiban formal untuk memenuhi tuntutan regulasi, bukan sebagai strategi keberlanjutan jangka panjang (Dewi, 2015). Persepsi ini menyebabkan CSR cenderung diperlakukan sebagai pengeluaran tambahan daripada investasi strategis. Akibatnya, program CSR sering kali bersifat simbolis atau formalitas, tanpa perencanaan matang untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan perubahan paradigma di kalangan perusahaan untuk melihat CSR sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka.

Kesenjangan yang terjadi dalam penerapan CSR di Indonesia terletak pada perbedaan antara harapan dan realitas, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan. Di satu sisi, masyarakat berharap CSR dapat membawa manfaat nyata seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan lokal, dan pelestarian lingkungan (Sopyan, 2014). Namun, di sisi lain, banyak program CSR yang dijalankan secara seremonial tanpa dampak substansial. Ketidakjelasan kebijakan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan perusahaan, serta minimnya pengawasan menjadi penyebab utama kesenjangan ini. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dari berbagai pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari program CSR.

Penelitian ini sangat relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi CSR di Indonesia. Dengan pemahaman mendalam tentang hambatan regulasi, teknis, maupun

organisasi, penelitian ini dapat mengusulkan solusi konkret yang dapat diterapkan oleh perusahaan dan pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki efektivitas program CSR, tetapi juga untuk menciptakan sinergi antara kepentingan bisnis perusahaan dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, CSR dapat menjadi alat strategis yang bermanfaat bagi semua pihak.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam membantu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat memahami tantangan dalam pelaksanaan CSR. Dengan menggali faktor-faktor yang memengaruhi implementasi CSR, penelitian ini dapat menawarkan rekomendasi yang praktis untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kebijakan CSR yang lebih terintegrasi, meningkatkan efektivitas program CSR, dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori CSR dengan menjelaskan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan secara lebih efektif di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan bagi perusahaan dalam merancang dan menjalankan program CSR yang tepat sasaran, efisien, dan berdampak positif. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi penting baik untuk pengambil kebijakan maupun praktisi dalam memaksimalkan potensi CSR sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi dokumen, yang bertujuan untuk mengidentifikasi data terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data yang relevan. Data primer berasal dari laporan tahunan perusahaan yang memuat informasi tentang program CSR, pelaksanaan, serta evaluasi dampaknya. Sementara itu, data sekunder mencakup jurnal akademik, buku, dan dokumen kebijakan pemerintah, seperti peraturan terkait CSR, termasuk Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami pola, hambatan, dan peluang dalam pelaksanaan CSR. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang mendalam dan terperinci mengenai faktor pendukung dan penghambat CSR, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif berdasarkan temuan yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur (Ardyan et al., 2023). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan permasalahan implementasi CSR di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep di mana perusahaan bertanggung jawab tidak hanya terhadap keuntungan finansial, tetapi

juga terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Definisi CSR mencakup berbagai aspek, mulai dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, hingga pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Azheri, 2011). CSR mencakup tiga dimensi utama: ekonomi, yang berkaitan dengan pencapaian keuntungan secara etis; sosial, yang mencakup kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat; dan lingkungan, yang melibatkan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Nopriyanto, 2024). Dimensi-dimensi ini mencerminkan pendekatan holistik yang harus diambil oleh perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka.

Di Indonesia kebijakan mengenai CSR diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk melaksanakan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait CSR yang mengarahkan perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui program-program yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Astri, 2012). Meskipun sudah ada landasan hukum, tantangan dalam penerapan kebijakan CSR sering kali muncul akibat kurangnya pedoman teknis yang jelas, serta ketidaksesuaian antara ekspektasi pemerintah dan dunia usaha dalam hal implementasi kebijakan CSR.

Usia perusahaan memiliki pengaruh

signifikan terhadap penerapan CSR. Perusahaan yang telah lama berdiri cenderung memiliki pengalaman yang lebih matang dalam menjalankan operasional bisnis dan memahami pentingnya tanggung jawab sosial. Pengalaman ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan, serta mampu mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis mereka. Selain itu, perusahaan yang lebih tua biasanya telah membangun reputasi yang kuat, sehingga mereka lebih terdorong untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan melalui program CSR yang efektif.

Jenis industri juga berperan penting dalam mendorong penerapan CSR. Industri yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta manufaktur, sering kali mendapatkan tekanan yang lebih besar untuk menjalankan CSR. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi masyarakat dan pemerintah agar perusahaan tersebut mengurangi dampak negatif dari operasionalnya. Sebaliknya, perusahaan dalam sektor jasa atau teknologi mungkin menghadapi tekanan yang lebih kecil, tetapi mereka tetap diharapkan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui inisiatif sosial yang relevan (Susiloadi, 2008).

Budaya organisasi adalah faktor internal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi CSR. Perusahaan dengan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial akan lebih mudah mengintegrasikan

CSR dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Budaya ini biasanya tercermin dalam kepemimpinan yang visioner, kebijakan internal yang progresif, dan keterlibatan seluruh karyawan dalam mendukung program CSR. Ketika budaya organisasi mendorong karyawan untuk berkontribusi pada inisiatif sosial, perusahaan dapat menciptakan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.

Pelanggan memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan CSR. Kesadaran pelanggan terhadap pentingnya produk dan layanan yang berkelanjutan terus meningkat, sehingga banyak perusahaan mulai menyesuaikan praktik bisnis mereka untuk memenuhi harapan ini (Mapisangka, 2009). Konsumen modern cenderung memilih produk dari perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, tuntutan pasar yang berasal dari preferensi pelanggan menjadi insentif kuat bagi perusahaan untuk mengembangkan program CSR yang relevan dan berdampak.

Karyawan juga merupakan pemangku kepentingan yang memainkan peran penting dalam implementasi CSR. Karyawan yang merasa bahwa perusahaan mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap CSR biasanya lebih termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan mereka (Eksanti & Sisdiyanto, 2025). Selain itu, banyak karyawan saat ini, terutama generasi muda, mencari perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan kepedulian sosial dan lingkungan mereka. Oleh karena itu, program CSR yang dirancang dengan baik tidak hanya

menarik karyawan berbakat, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang positif dan meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Peran karyawan dalam mendukung dan menjalankan inisiatif CSR secara langsung dapat memperkuat dampak program tersebut di masyarakat (Iryadana, 2024).

Salah satu hambatan utama dalam penerapan CSR di Indonesia adalah kurangnya kejelasan peraturan terkait pelaksanaannya. Meskipun Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan tertentu untuk melaksanakan CSR, tidak ada pedoman teknis yang rinci mengenai bagaimana kewajiban ini harus dilaksanakan. Ketidakjelasan ini mencakup definisi, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan CSR. Akibatnya, banyak perusahaan yang bingung dalam merancang dan melaksanakan program CSR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harapan pemerintah.

Kendala lain yang signifikan adalah kurangnya sinkronisasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mengimplementasikan CSR. Sering kali, pemerintah memiliki ekspektasi tertentu terkait CSR, seperti kontribusi terhadap pembangunan daerah, tetapi hal ini tidak selalu selaras dengan prioritas perusahaan. Ketidaksinkronan ini dapat menyebabkan konflik antara kedua pihak, terutama dalam menentukan fokus program CSR dan alokasi sumber daya. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan perusahaan menghambat tercapainya sinergi yang diperlukan untuk memastikan CSR berjalan secara optimal.

Penerapan CSR juga menghadapi kendala teknis, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang CSR. Banyak perusahaan di Indonesia belum memiliki tim khusus yang terlatih untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi program CSR secara profesional. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau minimnya pemahaman perusahaan tentang pentingnya CSR sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Sebagai hasilnya, program CSR sering kali dijalankan secara ad-hoc tanpa perencanaan yang matang, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan menjadi kurang signifikan.

Dampak dari Tantangan dan Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan *Corporate Social Responsibility*

Tantangan dalam penerapan CSR di Indonesia dapat berujung pada potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat, terutama ketika kebijakan dan pelaksanaan CSR tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Sebagai contoh, perusahaan yang berfokus pada CSR di bidang pendidikan atau kesehatan mungkin diharapkan oleh masyarakat untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnisnya, terutama di sektor-sektor seperti pertambangan atau industri berat. Ketika masyarakat merasa bahwa perusahaan tidak memenuhi kebutuhan mereka yang

lebih mendesak, seperti akses terhadap lingkungan yang lebih sehat atau sumber daya alam yang lebih terjaga, potensi konflik akan meningkat (Piloguli et al., 2023). Konflik juga bisa muncul apabila perusahaan tidak terbuka dalam berkomunikasi dengan masyarakat atau tidak mendengarkan aspirasi mereka. Program CSR yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya sering kali dianggap tidak relevan dan tidak mengena pada permasalahan yang dihadapi komunitas setempat.

Tantangan dalam implementasi CSR juga menciptakan hambatan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan stakeholders, baik itu pelanggan, karyawan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah. Salah satu hambatannya adalah ketidaksesuaian antara tujuan perusahaan dengan ekspektasi stakeholder, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan persepsi tentang apa itu tanggung jawab sosial yang sesungguhnya. Misalnya, perusahaan mungkin melihat CSR sebagai kewajiban untuk memenuhi kewajiban hukum, sementara masyarakat atau pelanggan mengharapakan lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban minimum tersebut, seperti kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Kendala lain dalam menciptakan hubungan yang harmonis adalah ketidaktepatan dalam merumuskan dan melaksanakan program CSR yang sesuai dengan karakteristik masing-masing stakeholder. Stakeholder yang berbeda memiliki kepentingan yang beragam; pelanggan mungkin lebih tertarik pada aspek keberlanjutan produk, sedangkan masyarakat sekitar lebih menyoroti

dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak ini dapat merusak hubungan jangka panjang dengan stakeholder dan menghambat terciptanya iklim bisnis yang saling mendukung. Komunikasi yang buruk antara perusahaan dan stakeholder juga dapat memperburuk hubungan. Tanpa adanya dialog yang terbuka dan transparan mengenai tujuan, pelaksanaan, dan hasil dari program CSR, stakeholder mungkin merasa diabaikan atau bahkan diperlakukan tidak adil.

Salah satu solusi utama untuk mengatasi hambatan dalam penerapan CSR adalah penyusunan kebijakan CSR yang lebih jelas dan terintegrasi. Peraturan yang ada saat ini perlu diperbaharui dan disusun secara lebih rinci, dengan fokus pada pelaksanaan yang konkret dan terukur. Pemerintah perlu menetapkan pedoman yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan CSR, termasuk sektor-sektor prioritas yang harus diutamakan oleh perusahaan, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat. Kebijakan yang terintegrasi akan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta mengurangi ketidakpastian yang seringkali menjadi penghalang bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR secara efektif. Dengan kebijakan yang jelas, perusahaan akan lebih mudah memahami tanggung jawab mereka dan menyesuaikannya dengan kebutuhan sosial dan lingkungan yang ada. Penyusunan kebijakan CSR yang terintegrasi juga melibatkan konsistensi

antara kebijakan perusahaan dengan peraturan yang berlaku di tingkat lokal dan nasional. Integrasi kebijakan ini akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dan mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan CSR, penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk bekerja sama lebih erat. Kolaborasi ini akan menciptakan keselarasan antara kebijakan pemerintah dengan program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan. Pemerintah dapat membantu dengan memberikan insentif atau dukungan bagi perusahaan yang melaksanakan CSR secara konsisten dan berdampak positif. Di sisi lain, perusahaan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi prioritas pemerintah (Jao et al., 2023). Melalui kolaborasi ini, baik perusahaan maupun pemerintah dapat memaksimalkan potensi CSR untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi ketidakpastian, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaksanaan CSR. Kolaborasi juga dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi antara perusahaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil, di mana semua pihak dapat saling bertukar pandangan dan ide mengenai prioritas dalam pelaksanaan CSR.

Solusi lainnya adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR. Masyarakat yang menjadi sasaran utama dari program CSR perlu

dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Perusahaan harus membuka saluran komunikasi yang jelas dan terbuka, serta menciptakan mekanisme konsultasi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan relevansi program CSR, tetapi juga akan memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, perusahaan dapat memperoleh wawasan langsung mengenai masalah yang dihadapi oleh komunitas tersebut, sehingga program CSR yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program CSR, yang dapat meningkatkan keberlanjutan dari program tersebut.

SIMPULAN

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama termasuk usia perusahaan yang lebih tua, jenis industri, dan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai keberlanjutan, serta peran penting pelanggan dan karyawan yang semakin sadar akan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, tantangan utama dalam implementasi CSR terletak pada kurangnya kejelasan peraturan, ketidaksinkronan antara pemerintah dan dunia usaha, serta kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang CSR. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan CSR, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan terintegrasi, kolaborasi yang

lebih erat antara perusahaan dan pemerintah, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan CSR.

Tantangan dalam penerapan CSR di Indonesia, seperti potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat serta hambatan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan stakeholder, sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebijakan perusahaan dan harapan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang dapat diterapkan meliputi penyusunan kebijakan CSR yang lebih jelas dan terintegrasi, kolaborasi yang lebih erat antara perusahaan dan pemerintah, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan CSR dapat lebih efektif dalam menciptakan dampak positif yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan menciptakan hubungan yang saling mendukung antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnahanifa, E. M., Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Optimalisasi *Corporate Social Responsibility* Sebagai Upaya Dalam Mendukung Penerapan Prinsip Berkelanjutan Pada Korporasi. *Nagari Law Review*, 4(2), 120–130. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v4.i.2.p.120-130.2021>
- Ambadar, J. (2013). *CSR DALAM PRAKTIK DI INDONESIA : WUJUD KEPEDULIAN DUNIA USAHA*. Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=FRpbDwAAQBAJ>
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A.,

- Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., Judijanto, L., & Efitra, E. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=A8LmEAAAQBAJ>
- Astri, H. (2012). PEMANFAATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BAGI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA. *Aspirasi*, 3(2), 151-165.
- Azheri, B. (2011). *Corporate social responsibility: Dari voluntary menjadi mandatory*. RajaGrafindo Persada.
- Budiman, B. (2019). Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ditinjau dari Teori Kesejahteraan Sosial dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(1), 73-90.
<https://doi.org/10.35194/jhnmj.v5i1.1104>
- Dewi, D. A. P. S. (2015). KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Brawijaya Law Student Journal*.
<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1350>
- Eksanti, V. G., & Sisdiyanto, E. (2025). Peran Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Lokal. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(1), 196-207.
- Fauzi, A., & Manao, M. (2023). FAKTOR KEBIJAKAN KEDISIPLINAN SUMBER DAYA MANUSIA, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY “CSR”, PENINGKATAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT. SKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(2), 67-80.
<https://doi.org/10.56127/jaman.v3i2.740>
- Hendar, J. (2013). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Sari Husada Cabang Yogyakarta Terhadap Lingkungan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2).
- Iryadana, M. R. (2024). Peran strategis sumber daya manusia dalam implementasi Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 167-176.
- Jao, R., Ng, S., Holly, A., Rotty, M. A., & Agustuty, L. (2023). PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN REPUTASI PERUSAHAAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP STOCK RETURN. *JAK: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 14-29.
- Mapisangka, A. (2009). Implementasi CSR terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan (Journal of Economics and Development Studies)*, 1(1), 39-47.
- Nopriyanto, A. (2024). ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY (CSR)
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN.
Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen,
5(2), 1-12.
<https://doi.org/10.15575/jim.v5i2.37655>

Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3),
281-298.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298>

Pilonguli, F., Ibrahim, R., & Hatu, D. R. R. (2023). Konflik Masyarakat dan Perusahaan Desa Motoduto Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Dynamics of Rural Society Journal*, 1(2), 93-100.

Pratiwi, A., Nurulrahmatia, N., & Muniarty, P. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI. *Owner*, 4(1), 95.
<https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.201>

Santoso, M. B., & Raharjo, S. T. (2022). DISKURSUS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs). *Share : Social Work Journal*, 11(2), 100-121.
<https://doi.org/10.24198/share.v11i2.37076>

Sopyan, Y. (2014). Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Implementasi Fikih Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Akham*, XIV(1), 53-62.

Subyantoro, A., & Suwanto, F. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi*. Andi Offset.
<https://books.google.co.id/books?id=-5EBEAAAQBAJ>

Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal*